

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK  
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Air Permukaan merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya setelah dikurangi insentif pemungutan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagian Pemerintah Provinsi dan bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober sampai dengan Desember 2015;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 29);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17);
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/01/KUM/2015 tentang Penetapan Anggaran Kas Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0336/KUM/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/01/KUM/2015 tentang Penetapan Anggaran Kas Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

## BAB II

### HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN YANG DIBAGI

#### Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang akan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi adalah sebesar 50% dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% dari total penerimaan Pajak Air Permukaan setelah dikurangi insentif pemungutan sebesar 3% dari target Pajak Air Permukaan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Target Pajak Air Permukaan adalah sebesar Rp2.633.735.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Target Pajak Air Permukaan berdasarkan Anggaran Kas Pendapatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar  $35\% \times \text{Rp}2.633.735.000,00 = \text{Rp}921.807.250,00$  (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Insentif pemungutan adalah sebesar  $3\% \times \text{Rp}921.807.250,00 = \text{Rp}27.654.217,50$  (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah lima puluh sen).
- (5) Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan yang diterima sesuai Pembukuan B IX Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah sebesar Rp1.045.699.964,00 (satu miliar empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Besarnya dana bagi hasil penerimaan Pajak Air Permukaan untuk yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah  $\text{Rp}1.045.699.964,00 - \text{Rp}27.654.217,50 = \text{Rp}1.018.045.746,50$  (satu miliar delapan belas juta empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah lima puluh sen).
- (7) Alokasi penerimaan untuk Pemerintah Provinsi adalah sebesar  $50\% \times \text{Rp}1.018.045.746,50 = \text{Rp}509.022.873,25$  (lima ratus sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen).
- (8) Alokasi Penerimaan untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah sebesar  $50\% \times \text{Rp}1.018.045.746,50 = \text{Rp}509.022.873,25$  (lima ratus sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen).

## BAB III

### POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

#### Bagian Kesatu

#### Pola Pembagian

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Penerimaan Pajak Air Permukaan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
  - a. 40% dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota sebagai aspek pemerataan; dan

- b. 60% dibagi berdasarkan potensi penerimaan Pajak masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan Pajak Air Permukaan untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyaluran  
Pasal 4

Setelah Peraturan Gubernur ini diberlakukan, Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Alokasi Pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Penatausahaan  
Pasal 5

- (1) Penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dicantumkan dalam APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Pencantuman Dana penerimaan Air Permukaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada Pos Bagi Hasil Pajak Provinsi.

BAB IV  
PENGUNAAN  
Pasal 6

- (1) Dana Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk Pembiayaan Rutin dan/atau Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyaluran dan penggunaan selanjutnya atas dana penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Januari 2016

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN  
 UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI  
 DENGAN DESEMBER 2015

DAFTAR PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
 PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	40% DIBAGI RATA	60% DIBAGI BERDASAR POTENSI PENERIMAAN PAJAK			JUMLAH PEMBAGIAN KABUPATEN/KOTA
		ALOKASI PER KABUPATEN/KOTA	PENERIMAAN PAJAK	POTENSI (%)	ALOKASI PER KABUPATEN/KOTA	
1	BANJARMASIN	15.662.242,26	124.115.141,00	11,87	36.252.609,02	51.914.851,28
2	BATOLA	15.662.242,26	4.557.350,00	0,44	1.343.820,39	17.006.062,65
3	BANJARBARU	15.662.242,26	-	0,00	-	15.662.242,26
4	TANAH LAUT	15.662.242,26	25.858.223,00	2,47	7.543.718,98	23.205.961,24
5	BANJAR	15.662.242,26	579.068.857,00	55,38	169.138.120,28	184.800.362,54
6	TAPIN	15.662.242,26	19.416.590,00	1,86	5.680.695,26	21.342.937,52
7	H S S	15.662.242,26	13.118.203,00	1,25	3.817.671,55	19.479.913,81
8	H S T	15.662.242,26	9.305.890,00	0,89	2.718.182,14	18.380.424,40
9	BALANGAN	15.662.242,26	30.275.210,00	2,89	8.826.456,62	24.488.698,88
10	TABALONG	15.662.242,26	109.295.310,00	10,45	31.915.734,14	47.577.976,40
11	H S U	15.662.242,26	17.189.770,00	1,64	5.008.785,07	20.671.027,33
12	TANAH BUMBU	15.662.242,26	69.400.450,00	6,64	20.279.471,27	35.941.713,53
13	KOTABARU	15.662.242,26	44.098.970,00	4,22	12.888.459,15	28.550.701,41
	JUMLAH	203.609.149,38	1.045.699.964,00	100,00	305.413.723,87	509.022.873,25

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM